

Analisis kinerja pegawai pada kebijakan *work from home*

Tetty Alpianti^{1*}, Haura Atthahara², Gunung Gumilar³

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*Email: tettyalpyn25@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan akibat ditetapkannya Covid 19 sebagai pandemi, salah satu kebijakan Pemerintah yaitu dengan diberlakukannya Bekerja dari Rumah atau *Work From Home (WFH)*. Menindaklanjuti sesuai dengan instruksi dari Presiden Indonesia yang berkaitan dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Hal tersebut upaya untuk memutus mata rantai Covid 19. Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 800/2072/BKKPD Tahun 2020. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi salah satu instansi yang diwajibkan untuk bekerja di rumah, namun tidak semuanya untuk bekerja di rumah ada sebagian yang masih bekerja di kantor. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi terhadap kebijakan bekerja dari rumah. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari artikel ini bahwa secara keseluruhan kinerja pegawai pada kebijakan *work from home* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sudah cukup baik.

Kata Kunci : Bekerja dari rumah; kinerja pegawai

Performance analysis of employees on work from home policy

Abstract

The Indonesian government has taken a policy due to the stipulation of Covid 19 as a pandemic, one of the government's policies is the implementation of Work From Home (WFH). Following up on instructions from the President of Indonesia regarding working from home, studying from home, and worshipping at home. This is an effort to break the chain of Covid 19. The Bekasi City Government issued a Circular Letter for the Mayor of Bekasi Number 800/2072/BKKPD Year 2020. The National Unity and Political Agency of Bekasi City is one of the agencies that are required to work from home, but not all of them work at home, some are still working in the office. This article aims to find out how the performance of employees of the Bekasi City National Unity and Political Agency towards the work from home policy. In examining these problems, researchers used research methods with a qualitative approach. The results of this article show that the overall performance of employees on the work from home policy at the National Unity and Political Agency of Bekasi City is quite good.

Keywords: *Work from home; employee performance;*

PENDAHULUAN

Virus Corona atau yang biasa di sebut dengan Covid 19 hampir semua Negara di Dunia dihadapi oleh virus tersebut yang terjadi mulai pada tahun 2020 (*Merdeka.Com*). Awal kemunculan virus ini terdapat di Wuhan, China. Indonesia termasuk salah satu Negara yang terdampak virus Covid 19 tersebut. Virus Covid 19 masuk ke Indonesia berawal pada bulan Maret 2020 di temukan di Depok dengan menjangkit dua warga Indonesia (*news.detik.com*). Virus Corona tersebut setiap hari dalam beberapa waktu semakin menyebar serta semakin meningkat garfiknya. Oleh karena itu, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera mengambil kebijakan dalam upaya untuk memutus mata rantai Covid 19 ini yang semakin hari semakin meningkat jumlah kasusnya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menetapkan Covid 19 sebagai pandemi global dengan melalui siaran langsung Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menyampaikan bahwa Covid 19 dinyatakan Pandemi Global, pada Kamis tanggal 12 Maret 2020 (*National Geographic.com*). Pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan akibat ditetapkannya Covid 19 sebagai pandemi, salah satu kebijakan Pemerintah yaitu dengan diberlakukannya Bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH) (*Ombudsman RI.com*). Pemerintah mengambil kebijakan Work Form Home dengan maksud untuk jaga jarak atau social distancing agar tidak terjadi kerumunan yang dapat menularkan virus covid 19.

Pada hari Minggu, 15 Maret 2021, Presiden Indonesia Joko Widodo dalam Konferensi Pers yang dilakukan di Istana Bogor, beliau menginstruksikan bahwa saatnya untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta untuk ibadah di rumah. Berdasarkan dengan instruksi Presiden tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara selama merebaknya kasus Virus Covid 19. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2020).

Surat Edaran tersebut mempunyai maksud sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang digunakan untuk upaya pencegahan Covid 19 serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di lingkungan instansi pemerintah serta di lingkungan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas-tugas serta fungsinya di instansi pemerintah harus tetap berjalan dengan baik dan efektif.

Hal tersebut telah tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia (*lawjustice.com*).

Menindaklanjuti sesuai dengan instruksi dari Presiden Indonesia yang berkaitan dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Hal tersebut upaya untuk memutus mata rantai Covid 19. Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 800/2072/BKKPD Tahun 2020. PKA berlaku ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2020 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan aparaturnya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home) yang merupakan upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 (*beritasatu.com*).

Walikota Bekasi dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam memimpin, mengendalikan, serta mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya yaitu Bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri, Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Perwal Kota Bekasi Nomor 58/2014 Perubahan atas Perwal Kota Bekasi Nomor 59/2013) (*Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Indonesia Kota Bekasi, n.d.*). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi salah satu instansi yang diwajibkan untuk bekerja di rumah, namun tidak semuanya untuk bekerja di rumah ada sebagian yang masih bekerja di kantor. Untuk mengkoordinasi dan sebagai

pengawasan, setiap hari dari setiap bidang atau bagian untuk wajib melaporkan kegiatan baik yang work from home ataupun yang di kantor.

Bekerja dari rumah (*Work From Home*) memiliki kewajiban yang sama dengan bekerja di kantor namun dari sisi pelaksanaannya tidak mudah dan masih terdapat kendala yang dikarenakan tidak semua bidang pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, diantaranya seperti Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan tiap harinya ada saja yang datang untuk meminta surat izin pendirian rumah ibadah dan adapula Ormas yang mau mendaftar untuk terdaftar dalam Ormas Kota Bekasi. Faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan *work from home* atau bekerja dari rumah yaitu masih kurangnya koordinasi, terkendala gangguan dari lingkungan rumah, dan lain-lain. Maka oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengantisipasi serta mengatasi kendala dalam melaksanakan *work from home* ini.

Kajian artikel mengenai Kinerja Pegawai dalam pelaksanaan *work from home* telah dilakukan oleh beberapa penulis. Misalnya, Rezeky Ana A (Ashal, 2020) dengan artikel yang berjudul Pengaruh Work From Home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Hasil dari kajian artikel tersebut yaitu pelaksanaan *Work From Home* yang dilakukan berjalan dengan baik, tidak ditemukannya faktor penghambat yang begitu fatal terhadap kinerja pegawainya. Para pegawai masih tetap terjaga serta tetap mengedepankan pelayanan dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Perbedaan artikel tersebut dengan artikel penulis yaitu terletak dari objek kajian, tempat penelitian, dan juga teori yang digunakan. Dalam artikel ini, objek kajian penulis terdapat pada kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tempat kajian penulis yaitu di Kota Bekasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis Kinerja Pegawai dalam Pelaksanaan *Work From Home* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi terhadap kebijakan *work from home*.

METODE

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2017) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berasal dari kata-kata tertulis maupun lisan seseorang yang sedang diamati. Data Primer artikel ini yaitu hasil wawancara bersama dengan Kepala Bidang Kerukunan Beragama dan Bermasyarakat serta dua pegawai pelaksana sebagai informan guna melengkapi kebutuhan data untuk penelitian ini. Penulis juga melakukan observasi pengamatan selama penulis melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Data Sekunder dalam artikel ini yaitu berasal dari artikel berita, serta data-data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode analisis data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada saat penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yaitu pada bulan Juli hingga Agustus 2020. Tempat kajian artikel ini pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Hal tersebut dilakukan jika pekerja melakukan pekerjaan jarak jauh dengan menggunakan komunikasi digital dalam melakukan koordinasi. Hal tersebut dilakukan dalam periode sementara dikarenakan terdapat covid 19 yang terjadi di hampir seluruh negara. Kebijakan *work from home* dilakukan untuk meminimalisir resiko pada kesehatan serta keselamatan individu terkait.

Menurut (Amstrong, 2015) kinerja yaitu aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang diarahkan dalam pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya. Sedangkan, menurut (Sinambela, 2012) kinerja merupakan suatu tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. Setiap organisasi membutuhkan seorang pegawai yang baik atau kualitas pegawai yang baik untuk mencapai tujuan (Yulianti, 2020).

Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai atau hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya. Pegawai Negeri Sipil merupakan sumberdaya yang penting bagi lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan bakat, tenaga, serta kreativitas untuk mencapai tujuan. Manajemen Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 (Wijanarko, 2020).

Pada saat ini, dimana akibat pandemic covid 19 maka mengharuskan pegawai bekerja dari rumah yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. Dalam kebijakannya para pegawai bergantian bekerja, sebagian ada yang bekerja dari rumah dan sebagiannya lagi bekerja di kantor. Hasilnya mungkin tidak akan sama dari setiap pegawai dari setiap pekerjaan, namun setidaknya jika pegawai bekerja dari rumah harus tetap melakukan koordinasi dengan kantor. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi sudah cukup berjalan dengan baik.

Berikut hasil kajian kinerja pegawai pada kebijakan *work from home* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, sebagai berikut:

Kualitas kerja

Kualitas kerja merupakan tolak ukur dari hasil kerja yang diukur dengan efektivitas dan efisiensi dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara, kualitas kerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi selama melaksanakan *Work From Home* dalam setiap bidang dari sisi kualitas pegawai cukup baik. Pegawai cepat tanggap dalam menyelesaikan pekerjaan serta cukup responsive dalam menanggapi perintah dari atasan.

Namun, di beberapa bidang, dengan *work from home* ini para pegawai menganggap kurang efektif bila dibandingkan dengan bekerja di kantor. Menurutnya, terdapat beberapa pekerjaan yang memang harus diselesaikan di kantor bila pekerjaan tersebut dilakukan di rumah maka untuk penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari sisi pengawasan juga dengan *work from home* ini tidak begitu kuat atau ketat sehingga pegawai menganggap *work from home* ini lebih santai dan akibatnya responsibilitas aparatur atau pegawai terhadap pekerjaan tersebut menurun.

Terdapat perbedaan yang signifikan yang pegawai rasakan bila dibandingkan dengan pekerja di rumah dan bekerja di kantor. Para pegawai diharuskan untuk membiasakan diri serta untuk tetap bertanggungjawab dengan pekerjaan yang telah diberikan selama bekerja dari rumah.

Kuantitas kerja

Kuantitas kerja merupakan ukuran seberapa lama seseorang pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya. Jika jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pegawai semakin banyak maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkannya.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berdasarkan kuantitas pekerjaannya dapat dikatakan cukup baik. Para pegawai selalu melaporkan kerjaan yang telah dilakukannya kepada atasan. Koordinasi antara atasan dengan pegawai baik. Para ASN menginput laporan kinerjanya pada aplikasi SIKERJA, untuk kinerja pada OPD menginput pada sistem SIKEPO. Untuk rekapitan laporan dengan mengisi setiap harinya secara manual. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pelaporan tanggungjawab yang telah dilaksanakan berdasarkan tanggungjawabnya.

Bidang Kerukunan Beragama dan Bermasyarakat dalam melakukan pelayanan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah, Surat Tanda Laporan kepengurusan keberadaan Ormas dan Permohonan Pengajuan HIBAH oleh Partai Politik dan Ormas yang di bantu dengan Bidang Poldagri. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi dalam pelayanan tetap mematuhi Protokol

Kesehatan dan juga pemohon yang datang wajib memakai masker dan handsanitizer dan juga tetap menjaga jarak. Di Kantor Badan Kesbangpol Kota Bekasi juga selalu dilakukan penyemprotan Desinfektan setiap sorenya untuk memutus mata rantai Covid-19 dan mencegah penyebaran Covid-19.

Kedisiplinan pegawai

Kedisiplinan pegawai merupakan perilaku yang dilakukan oleh pegawai yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuan, kesetiaan, serta keteraturan dan ketertiban serta menjauhi larangan. Semakin tinggi disiplin kerja yang dilakukan pegawai maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai. Disiplin merupakan bentuk seberapa bertanggungjawab seseorang atau pegawai dalam melakukan pekerjaan. Kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari absen setiap pegawai, bagaimana pakaian yang dikenakan oleh pegawai, serta ketelitian pegawai.

Kedisiplinan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam segi absensi tepat waktu kurang optimal karena pegawai yang WFH di berikan kompensasi bebas finger tetapi untuk pegawai yang di kantor tetap absensi melalui fingerprint yaitu pukul 07.30-16.00 WIB. Namun tetap bagi yang WFH apabila ada instruksi dari pimpinan biasanya melalui whatsapp group atau personal chat.

Kreativitas pegawai

Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Seorang pegawai yang memiliki kreativitas dalam dirinya biasanya mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri, kemandirian dalam penilaian, pikiran dan tindakan yang dilakukan, serta siap untuk mengambil resiko yang di perhitungkan, dan keterbukaan terhadap pengalaman.

Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi para pegawainya dari tingkat kreativitas cukup baik, karena setiap bidang selalu melaporkan dan memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan publik.

Tanggungjawab pegawai

Setiap pegawai memiliki tanggungjawab yang berbeda. Tanggungjawab pegawai berbeda dengan atasan. Tanggungjawab merupakan suatu kesanggupan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah dibebankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta berani menanggung resiko atas keputusan yang telah diambilnya.

Dari wawancara yang penulis lakukan dari segi Tanggung jawab pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sudah cukup baik para pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, selalu mengkoordinasikan serta tanggung jawab atas apa yang sudah di tugaskan kepadanya. Para pegawai yang berdinasi di kantor juga selalu berada di tempat kerjanya dalam segala keadaan, selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun golongan dan selalu menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik negara yang telah dipercayakan kepadanya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja pegawai pada kebijakan work from home di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sudah cukup baik. Kualitas pekerjaan yang di hasilkan pegawai pada saat Work From Home di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sudah cukup baik, namun ada beberapa bidang yang mengatakan kurang optimal di karenakan menganggap WFH lebih santai karena kurang pengawasan dari atasan. Kuantitas pekerjaan yang di hasilkan pegawai pada saat Work From Home di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sudah cukup baik, pegawai selalu melaporkan apa saja yang sudah di kerjakan.

Kedisiplinan Pegawai di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. dalam segi absensi tepat waktu kurang optimal karena pegawai yang WFH di berikan kompensasi bebas fingerprint tetapi untuk pegawai yang di kantor tetap absensi melalui fingerprint. Kreativitas Pegawai di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada saat work from home dari tingkat kreativitas cukup baik, karena setiap bidang selalu melaporkan dan memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan publik. Tanggung jawab Pegawai di Kantor Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada saat work from home sudah cukup baik para pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, selalu mengkoordinasikan dan tanggung jawab atas apa yang sudah di tugaskan kepadanya. Para pegawai yang berdinan di Kantor juga selalu berada di tempat kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ashal, R. A. (2020). Pengaruh Work From Home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 223–242. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2020.V14.223-242>
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indonesia Kota Bekasi. (n.d.). Retrieved August 27, 2021, from <https://kesbangpol.bekasikota.go.id/id/>
- Cerita Lengkap Asal Mula Munculnya Virus Corona di Wuhan | *merdeka.com*. (n.d.). Retrieved August 26, 2021, from <https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html>
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2020). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru. *Kkp.Go.Id*, 1–9. <https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/19901-surat-edaran-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-58-tahun-2020-tentang-sistem-kerja-pegawai-aparatur-sipil-negara-dalam-tatanan-normal-baru>
- Moleong, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pelaksanaan Work From Home di Indonesia, Ini Dasar Hukumnya. (n.d.). Retrieved August 27, 2021, from <https://www.law-justice.co/artikel/83389/pelaksanaan-work-from-home-di-indonesia-ini-dasar-hukumnya/>
- Pemkot Bekasi Terapkan Pegawai Bekerja dari Rumah. (n.d.). Retrieved August 27, 2021, from <https://www.beritasatu.com/megapolitan/610307/pemkot-bekasi-terapkan-pegawai-bekerja-dari-rumah>
- Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia. (n.d.). Retrieved August 26, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>
- Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Virus Corona dan Pembatasan Pelayanan Publik - Ombudsman RI. (n.d.). Retrieved August 26, 2021, from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--virus-corona-dan-pembatasan-pelayanan-publik>
- WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? - *National Geographic*. (n.d.). Retrieved August 26, 2021, from <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>
- Wijanarko, A. (2020). ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH. *Jl@P*, 9(1). <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/3558>
- Yulianti, L. (2020). ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIAMIS. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(3). <http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/36>